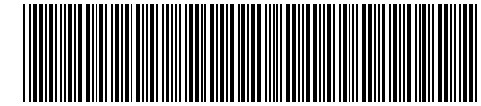




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : SP DIPA- 013.03.2.409211/2020**



DS:1685-8749-3068-0920

Revisi ke 02

Tanggal : 11 Juni 2020

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (03) | DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM |
| 3. Provinsi | : (18) | SULAWESI TENGAH |
| 4. Kode/Nama Satker | : (409211) | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU |
| Sebesar | : Rp. | 2.125.000.000 (DUA MILIAR SERATUS DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.03.07 Program Administrasi Hukum Umum
013.03.07.5251 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	2.125.000.000
Rp.	2.125.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 2.125.000.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-----------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN P A L U | (051) Rp. | 2.125.000.000 |
|-----------------|-----------|---------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Jakarta, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.03.2.409211/2020
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:1685-8749-3068-0920

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (03) DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode>Nama Satker : (409211) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

Kuasa Pengguna Anggaran : LILIK SUJANDI, Bc.IP., S.I.P., M. Si.
Bendahara Pengeluaran : MUHAMMAD IDHAM SUTOPO
Pejabat Penanda Tangan SPM : BURHAZIR ZAMDA R,S.H

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			2.125.000.000
Sub Fungsi	03.03	PEMBINAAN HUKUM			2.125.000.000
2 Program	013.03.07	Program Administrasi Hukum Umum			2.125.000.000
Sasaran Program	01	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang berkepastian hukum			
	02	Terwujudnya Otoritas Pusat yang efektif dan Tepat Sasaran			
Indikator Kinerja Program	01	Persentase penyelesaian layanan Administrasi Hukum Umum yang berkepastian hukum	82 %	Persentase	
	01	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ektradisi yang telah ditindaklanjuti	82 %	Persentase	
Output Program	01	Permohonan Layanan Administrasi Hukum Umum yang diselesaikan tepat waktu dan berkepastian Hukum			
Indikator Output Program	01	Jumlah Penyelesaian Permohonan Layanan Administrasi Hukum Umum yang tepat waktu dan berkepastian Hukum	7.133.611	Dokumen	
Kegiatan	5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah			2.125.000.000
Sasaran Kegiatan	01	Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah yang efektif			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah			
	01	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum			
	01	Persentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di wilayah			
Output Kegiatan	5251.001	Layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah	3 Laporan		1.559.644.000
Indikator Output Kegiatan	01	Terselenggaranya Layanan Administasi Hukum Umum di Kantor Wilayah	99	Laporan	
Output Kegiatan	5251.002	Layanan MKNW, MPW dan MPD Notaris	3 Dokumen Tindak Lanjut Pengaduan		565.356.000
Indikator Output Kegiatan	01	Terselenggaranya Majelis Kehormatan Wilayah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah Notaris	99	Laporan	

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.

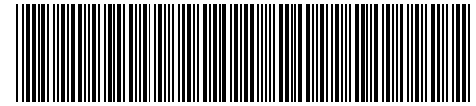
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : DIPA- 013.03.2.409211/2020

I B. SUMBER DANA



DS:1685-8749-3068-0920

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (03) DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
 Kode>Nama Satker : (409211) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

		Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2020	Rp.	2.125.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	2.125.000.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.03.2.409211/2020
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1685-8749-3068-0920

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (03) DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode>Nama Satker : (409211) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409211	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	-	2.125.000	-	-	-	2.125.000		
013.03.07	Program Administrasi Hukum Umum	-	2.125.000	-	-	-	2.125.000		
5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	2.125.000	-	-	-	2.125.000		
5251.001	Layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah	-	1.559.644	-	-	-	1.559.644	18.00	
04	PNBP	-	1.559.644	-	-	-	1.559.644	051	
5251.002	Layanan MKNW, MPW dan MPD Notaris	-	565.356	-	-	-	565.356	18.00	
04	PNBP	-	565.356	-	-	-	565.356	051	
JUMLAH		-	2.125.000	-	-	-	2.125.000		

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.03.2.409211/2020
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:1685-8749-3068-0920

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (03) DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode>Nama Satker : (409211) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

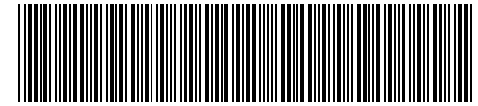
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409211	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	0	133.111	270.668	240.963	343.705	609.096	509.378	17.698	381	0	2.125.000
		52 BELANJA BARANG	0	0	0	133.111	270.668	240.963	343.705	609.096	509.378	17.698	381	0	2.125.000
	013.03.07.5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	0	0	133.111	270.668	240.963	343.705	609.096	509.378	17.698	381	0	2.125.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	133.111	270.668	240.963	343.705	609.096	509.378	17.698	381	0	2.125.000

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.03.2.409211/2020
IV A. B L O K I R**



DS:1685-8749-3068-0920

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [03] DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [18] SULAWESI TENGAH
Kode dan Nama Satker : [409211] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

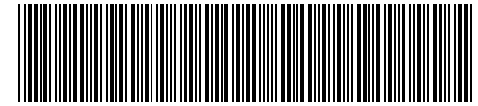
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 013.03.2.409211/2020
IV B. C A T A T A N**



DS:1685-8749-3068-0920

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [03] DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [18] SULAWESI TENGAH
Kode dan Nama Satker : [409211] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 12 November 2019
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001